

Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Kolaboratif di Kuala Trang

Feni Rotiva¹, Jaminah², Sabki³, Nurul Husni⁴, Faizal Rahman⁵, Dian Rosalina⁶,
Noer Octaviana Maliza⁷, *Nafisah Eka Puteri⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar,
Alue Peunyareng, Aceh Barat, 23615, Indonesia

*Corresponding author: nafisahekaputeri@utu.ac.id

Abstrak

Pengembangan desa wisata diyakini sebagai strategi pemulihan ekonomi dan pelestarian budaya, termasuk untuk Desa Kuala Trang di Nagan Raya yang memiliki potensi wisata pesisir namun belum tergarap optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, kapasitas SDM, dan promosi. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Desa Kuala Trang melalui pendekatan kolaboratif multi-pihak (pentahelix). Metode yang digunakan diawali dengan observasi dan pemetaan potensi, dilanjutkan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan industri untuk melakukan analisis SWOT dan menyusun rencana aksi. Hasil observasi mengonfirmasi perlunya sinergi antar pemangku kepentingan, dimana masing-masing memiliki peran kunci. Hasil FGD menghasilkan strategi berbasis analisis SWOT, yang merekomendasikan empat pendekatan utama: pemanfaatan peluang oleh kekuatan internal (S-O), mitigasi ancaman oleh kekuatan internal (S-T), pemanfaatan peluang untuk mengatasi kelemahan (W-O), dan strategi defensif untuk mengatasi kelemahan dan ancaman (W-T). Respon masyarakat menunjukkan minat tinggi untuk terlibat, terutama sebagai pengelola spot wisata, dengan kebutuhan prioritas pada pembangunan fasilitas dan promosi. Simpulan dari artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif bergantung pada implementasi rencana aksi kolaboratif yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemasaran yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Wisata; Kuala Trang; Kolaboratif; Pentahelix

1. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis desa semakin diakui sebagai upaya pemulihan dan pemerataan ekonomi daerah, sekaligus sarana pelestarian alam dan budaya [1]. Desa wisata dapat dipahami sebagai suatu bentuk integrasi kawasan pedesaan yang memiliki potensi alam, budaya, serta kehidupan sosial masyarakat yang dikelola dan dikembangkan secara terencana menjadi produk wisata. Potensi khas yang ada pada desa tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung [2]. Pembangunan sektor pariwisata berbasis desa terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pengembangan desa wisata dapat berhasil, diperlukan perhatian terhadap potensi ekonomi lokal, dukungan pemerintah, keterlibatan pihak swasta, serta partisipasi aktif dari berbagai kelompok kepentingan baik dari dalam maupun luar komunitas [3].

Di Aceh, Desa Kuala Trang di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, memiliki potensi pengembangan desa wisata berbasis pesisir. Daya tarik pantainya telah ada tetapi belum dikelola, sehingga diperlukan pengelolaan terencana dan berkelanjutan agar memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal [4]. Namun demikian, potensi yang dimiliki Desa Kuala Trang tidak dapat memberikan manfaat optimal tanpa adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung wisata, kapasitas sumber daya manusia, promosi yang masih minim, serta perlunya penguatan kelembagaan desa dalam mengelola sektor pariwisata. Selain itu, keberlanjutan ekologi pesisir dan kearifan lokal masyarakat juga perlu

dijaga agar pengembangan wisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun budaya setempat [5].

Oleh karena itu, strategi pengembangan Desa Kuala Trang sebagai desa wisata perlu dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Para pemangku kepentingan yang berperan mencakup perangkat desa, pemerintah daerah (khususnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga/Disbudparpora, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMGP4)), akademisi, industri, serta masyarakat lokal. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pariwisata desa yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Gampong (desa) Kuala Trang, Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi dan pemetaan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan yang ada, serta mitra potensial (Gambar 1). Selanjutnya, dilakukan identifikasi mendalam terhadap seluruh mitra, baik internal maupun eksternal. Data pada tahap ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk memahami kebutuhan desa dan masyarakat.

Berdasarkan temuan awal, dilakukan perancangan program. Rancangan program kemudian digunakan sebagai dasar tahap *Focus Group Discussion* (FGD). Forum FGD dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kelompok mitra yang telah teridentifikasi. Melalui FGD, para peserta berdiskusi untuk melakukan analisis SWOT, menyepakati prioritas program, dan merumuskan strategi serta rencana aksi yang konkret dan dapat dilaksanakan. Tahap akhir dari metode ini adalah implementasi dan pendampingan. Tim memberikan pendampingan dalam menjalankan rencana aksi yang telah disepakati untuk memastikan keberlanjutan inisiatif pengembangan desa wisata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Observasi dan Pemetaan

Dalam konteks pengembangan desa wisata, keterlibatan *stakeholders* internal maupun eksternal menjadi faktor kunci keberhasilan [6]. Berdasar hasil observasi dan pemetaan oleh tim, diketahui bahwa terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki potensi untuk berkolaborasi dalam pengembangan Kuala Trang sebagai desa wisata. *Stakeholders* internal yang terlibat dalam pengembangan desa wisata di Kuala Trang adalah perangkat desa dan masyarakat. Sedangkan pihak yang terlibat dalam *stakeholder* eksternal adalah pemerintah daerah (khususnya Disbudparpora, BAPPEDA, dan DPMGP4), akademisi Universitas Teuku Umar dan industri (khususnya PT. Socfindo). Pengelolaan desa wisata melalui sistem kolaborasi antar-*stakeholders* terbukti lebih efektif karena pengembangan pariwisata tidak dapat dijalankan secara parsial. Diperlukan sinergi peran yang saling mendukung untuk menciptakan tata kelola desa wisata yang berkelanjutan dan inklusif [6]. *Stakeholders* internal seperti perangkat desa dan masyarakat memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi potensi wisata, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi pelaku langsung dalam pengelolaan destinasi. *Stakeholder* eksternal terdiri dari pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia anggaran serta infrastruktur. Akademisi mendukung melalui riset, pelatihan, dan peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan.

Sementara itu, industri berkontribusi lewat dukungan teknis, dan program CSR yang meningkatkan standar layanan dan kualitas wisata. Sinergi ketiganya memperkuat peran masyarakat dan perangkat desa, sehingga pengembangan wisata menjadi lebih terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan [7]



Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Perangkat Desa

3.2. Peran Tiap Pihak

Perangkat desa menjadi ujung tombak karena memiliki kewenangan lokal. Perangkat desa berperan dalam merancang visi desa wisata, mengalokasikan anggaran, serta membentuk kelembagaan pendukung seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, perangkat desa juga mengelola aset desa, mengembangkan unit usaha berbasis pariwisata, dan menjaga kelestarian budaya maupun kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisata [8]. Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat penting karena mereka merupakan subjek utama sekaligus pemilik dari sumber daya yang dikembangkan. Masyarakat terlibat langsung sebagai pengelola dan pelaku usaha wisata melalui berbagai aktivitas. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai penjaga aset desa, baik alam maupun budaya, dengan menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan tradisi, serta memastikan daya tarik wisata tetap terjaga secara berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, keterlibatan masyarakat membuka peluang kerja, menambah pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Masyarakat juga berfungsi sebagai pengendali sosial dengan menjaga keamanan [9].

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai koordinator yang dapat menetapkan arah kebijakan sekaligus merumuskan berbagai strategi untuk mendorong pengembangan di wilayahnya. Disbudparpora berperan sebagai fasilitator, motivator, pengelola promosi, dan pembina kapasitas masyarakat/pariwisata [10]. Disbudpora berperan sebagai motivator dengan mendorong pengembangan potensi sumber daya, sehingga masyarakat di desa wisata misalnya di Desa Kuala Trang mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Peran Disbudparpora sebagai fasilitator memberikan arahan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi laut dan pantai secara berkelanjutan. Misalnya, masyarakat tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas wisata pantai, tetapi juga diarahkan untuk mengolah hasil laut menjadi produk olahan khas. Peran Disbudparpora dalam promosi pengembangan desa wisata diwujudkan melalui berbagai strategi untuk memperkenalkan potensi lokal agar dikenal luas dan menarik minat wisatawan.

Bentuk promosi tersebut antara lain dengan memanfaatkan media sosial, website resmi, dan brosur pariwisata. BAPPEDA berperan strategis dalam pengembangan desa wisata misalnya pengembangan desa wisata di Kuala Trang dengan memasukkan program desa wisata tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, desa wisata menjadi prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan tambahan [11]. ran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) dalam pengembangan desa wisata di Kuala Trang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, serta peningkatan peran perempuan. DPMGP4 berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelompok pengelola wisata, sehingga masyarakat mampu mengelola potensi lokal menjadi peluang ekonomi kreatif. Selain itu, pengendalian penduduk yang dilakukan juga penting untuk menyesuaikan daya dukung lingkungan dengan perkembangan pariwisata. Di sisi lain, DPMGP4 memberi ruang lebih luas bagi perempuan agar terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi [12].

Peran akademisi sangat penting dalam memberikan gagasan dan ide-ide bagi pengembangan desa wisata serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu menjawab kebutuhan desa [13]. Akademisi Universitas Teuku Umar berkontribusi melalui penelitian, pengabdian, dan pengembangan yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi potensi wisata pesisir di Desa Kuala Trang. Selain itu, akademisi juga berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Keterlibatan akademisi tidak hanya sebatas menyumbangkan konsep, tetapi juga memastikan implementasi program berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, kehadiran akademisi di desa wisata mampu mendorong terciptanya inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing.

Salah satu industri yang terlibat dalam pengembangan desa Wisata di Kuala Trang adalah PT. Socfindo. PT Socfindo adalah perusahaan perkebunan swasta yang bergerak di bidang kelapa sawit dan karet, dengan wilayah usaha yang tersebar di Sumatera Utara dan Aceh, termasuk di Kabupaten Nagan Raya. PT Socfindo memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan desa wisata berbasis pesisir di Kuala Trang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi [14]. Peran PT Socfindo di Desa Kuala Trang melalui CSR sebelumnya sudah terlihat nyata dan strategis antara lain pembersihan pantai hingga mengumpulkan 3 ton sampah [15] dan pelepasan 10.000 bibit ikan nila di kolam wisata [16]. Selain itu, PT Socfindo dapat membantu masyarakat pesisir dalam memperkuat sarana dan prasarana wisata seperti akses jalan menuju pantai, fasilitas kebersihan, dan ruang publik yang menunjang kenyamanan wisatawan.

3.3. Rekomendasi *Focus Group Discussion* (FGD)

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dapat disimpulkan bahwa inisiatif pengembangan Desa Wisata Kuala Trang yang berpusat pada pemberdayaan kelompok pemuda menempati posisi yang strategis namun penuh tantangan. Analisis SWOT mengungkapkan konfigurasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Dari aspek internal, kekuatan utama terletak pada human capital berupa semangat dan komitmen pemuda setempat, yang diperkuat oleh dukungan penuh pemerintah desa dan

kolaborasi multi-pihak (pentahelix) dalam proses pendampingan. Namun, kelemahan mendasar terdapat pada kapasitas teknis dan pengelolaan kelompok yang masih terbatas, serta ketergantungan pada pendampingan eksternal yang berpotensi menghambat kemandirian jangka panjang. Secara eksternal, Desa Kuala Trang berhadapan dengan peluang signifikan, terutama berupa momentum tren wisata alam dan berkelanjutan pasca-pandemi serta dukungan regulasi pemerintah yang kondusif. Meskipun demikian, ancaman serius berupa degradasi lingkungan, persaingan dengan destinasi wisata lain, dan kerentanan terhadap dinamika sosial-ekonomi tidak dapat diabaikan.

Merujuk pada temuan tersebut, diperlukan perumusan rencana aksi strategis yang transformatif untuk memastikan keberlanjutan initiative ini. Pertama, strategi *Strengths-Opportunities* (S-O) harus diwujudkan melalui optimalisasi peran pemuda dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan pengembangan produk wisata kreatif yang memanfaatkan peluang pasar. Kedua, strategi *Strengths-Threats* (S-T) perlu diimplementasikan dengan menetapkan peraturan desa dan sistem manajemen sampah yang ketat untuk memitigasi ancaman kerusakan lingkungan, sekaligus membangun identitas yang unik guna menghadapi persaingan. Ketiga, strategi *Weaknesses-Opportunities* (W-O) menjadi kunci untuk mengatasi kelemahan internal, yaitu dengan memanfaatkan dukungan pemerintah dan akademisi untuk menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen usaha, keuangan, dan tata kelola organisasi bagi kelompok pemuda. Akhirnya, strategi *Weaknesses-Threats* (W-T) yang bersifat defensif harus mencakup penyusunan business plan yang realistis dan mekanisme resolusi konflik internal untuk mengantisipasi ancaman kelelahan (burnout) dan ketidakstabilan kelompok. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif ini, transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang mandiri, berkelanjutan, dan inklusif bukan hanya sebuah visi, melainkan sebuah capaian yang dapat direalisasikan.

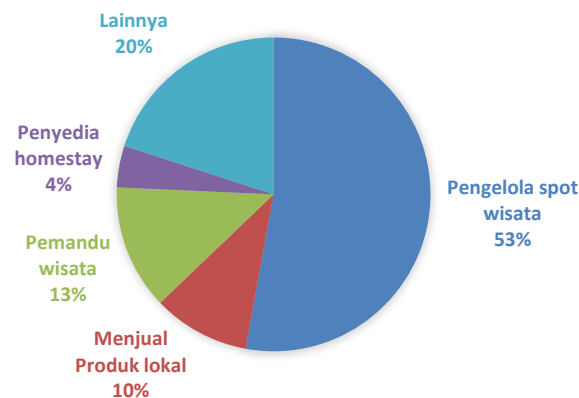


Gambar 2. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

3.4. Respon Masyarakat

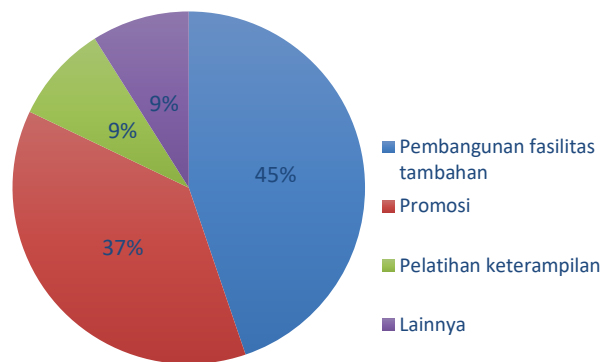
Setelah kegiatan FGD bersama tiap pihak, kemudian dilakukan pengukuran respon masyarakat terkait pengembangan desa wisata di Kuala Trang. Respon yang diukur mencakup bentuk keterlibatan dalam pengembangan wisata yang diinginkan masyarakat Kuala Trang serta bentuk pengembangan yang dirasa perlu dalam program ini. Berdasarkan diagram di Gambar 3, mayoritas masyarakat Desa Kuala Trang menginginkan keterlibatan sebagai pengelola spot wisata dengan persentase sebesar 53%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berperan langsung dalam mengelola dan memelihara objek wisata yang ada di desa mereka. Sementara itu, 20% masyarakat memilih kategori lainnya, yang mengindikasikan adanya berbagai bentuk partisipasi lain di luar kategori yang telah ditentukan. Selain itu, 13% masyarakat berminat menjadi pemandu wisata, yang mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya pelayanan informasi dan

pendampingan bagi wisatawan. Sebesar 10% masyarakat tertarik untuk menjual produk lokal, menunjukkan keinginan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan potensi ekonomi kreatif desa. Adapun keterlibatan sebagai penyedia homestay hanya dipilih oleh 4% masyarakat, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau minat dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa pengembangan desa wisata Kuala Trang memiliki potensi besar untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, dengan fokus utama pada pengelolaan spot wisata sebagai daya tarik utama.



Gambar 3. Bentuk Keterlibatan yang Diinginkan Masyarakat

Berdasarkan diagram di Gambar 4, mayoritas masyarakat Desa Kuala Trang menginginkan pembangunan fasilitas tambahan sebagai prioritas utama dalam pengembangan desa wisata dengan persentase sebesar 45%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai ketersediaan fasilitas pendukung merupakan faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisata desa. Selanjutnya, 37% masyarakat mengharapkan adanya promosi yang lebih gencar, menunjukkan kesadaran akan pentingnya strategi pemasaran untuk memperkenalkan desa wisata kepada khalayak yang lebih luas. Sementara itu, 9% masyarakat memilih pelatihan keterampilan, yang mencerminkan kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan wisata. Persentase yang sama, yakni 9%, juga memilih kategori lainnya, mengisyaratkan adanya usulan atau kebutuhan lain di luar pilihan yang disediakan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa pembangunan sarana prasarana dan upaya promosi menjadi fokus utama masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata Kuala Trang.



Gambar 4. Bentuk Pengembangan yang Diinginkan Masyarakat

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Kuala Trang, Nagan Raya, sebagai desa wisata berbasis pesisir memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Potensi alam yang dimiliki tidak akan memberikan dampak optimal tanpa diiringi dengan tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pentahelix), yaitu pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta.

Hasil observasi dan FGD mengidentifikasi peran kunci masing-masing pihak. Pemerintah desa dan masyarakat berperan sebagai subjek utama pengelola, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Akademisi dari Universitas Teuku Umar memberikan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, dan PT. Socfindo berkontribusi melalui program CSR. Respon masyarakat yang sangat positif, dengan mayoritas bersedia terlibat sebagai pengelola spot wisata dan mengutamakan kebutuhan akan fasilitas serta promosi, menjadi modal sosial yang sangat berharga.

Berdasarkan analisis SWOT, strategi pengembangan ke depan harus bersifat transformatif, dengan fokus pada (1) pemanfaatan teknologi digital dan peluang pasar oleh pemuda; (2) penerapan regulasi lokal untuk mitigasi ancaman lingkungan; (3) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan; serta (4) penyusunan rencana bisnis yang realistis untuk menjamin kemandirian. Dengan implementasi rencana aksi yang terintegrasi dan berkelanjutan, transformasi Kuala Trang menjadi desa wisata yang mandiri, berdaya saing, dan inklusif bukan hanya sebuah visi, melainkan sebuah capaian yang dapat direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] B. S. A. Utami, “Model Pengembangan Desa Wisata Tamansari Banyuwangi Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Desa Pasca Pandemi COVID-19,” *OECONOMICUS Journal of Economics*, vol. 7, no. 1, 2022.

[2] M. Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

[3] H. Lubis, N. Rohmatillah, dan D. Rahmatina, “Strategy of Tourism Village Development Based On Local Widom,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, hlm. 320, Sep 2020, doi: 10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385.

[4] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Pantai Seunagan, Kuala Trang, Kuala Pesisir, Nagan Raya: Profil Daya Tarik Pariwisata,” *Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas)*. .

[5] B. Sunaryo, *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media , 2013.

[6] R. Gilang Permana, T. Afrizal, dan A. Subowo, “Analisis Kolaborasi Pengelolaan Desa Wisata : Kasus di Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten,” *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 12, no. 2, 2023.

[7] N. Desak Made Santi Diwyarthi, I. Dewa Putu Hendri Pramana, I. Wayan Adi Pratama, N. Gede Mas Wiartha, dan I. Wayan Jata Politeknik Pariwisata Bali, “Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Wisata Budaya pada Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Melinggih Kelod, Payangan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 8, no. 3, 2025.

[8] Helmita, D. D. Yusda, dan O. Nila Sari, “Perananan Kepala Desa dalam Pengembangan Desa Wisata,” *Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi*, vol. 14, no. 1, 2022.

[9] M. S. Salsabila dan A. M. Fauzi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri),” *Jurnal Pariwisata Terapan*, vol. 5, no. 1, hlm. 2021, 2021.

- [10] A. P. Cindy, M. Budiatiningsih, dan B. N. Ulya, “Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam Mengembangkan Desa Wisata Aik Berik,” *Journal Of Responsible Tourism*, vol. 4, no. 3, 2025.
- [11] J. Junaedi, I. Saefulrahman, dan J. Sutisna, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Desa Wisata di Kabupaten Kuningan Tahun 2020,” *Juju Junaedi*, vol. 2, no. 2, 2022.
- [12] A. T. Rahayu, “Gambaran Keberdayaan Perempuan di Desa Wisata Pentingsari berdasarkan Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS),” 2018.
- [13] D. R. Yuniarsih, S. P. Damayanti, dan U. Mulyawan, “Partisipasi Akademisi dalam Pengembangan Desa Wisata Ekologi Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,” *JRT Journal Of Responsible Tourism*, vol. 2, no. 3, 2023.
- [14] A. Y. Mangin dan A. Kriswibowo, “Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 22, no. 2, hlm. 1153–1159, Jul 2022, doi: 10.33087/jiubj.v22i2.2344.
- [15] T. D. Iskandar, “Aksi bersih-bersih di pantai, karyawan PT Socfindo kumpulkan tiga ton sampah,” *Antara*, 18 Mei 2022. [Online]. Tersedia: <https://aceh.antaranews.com/berita/286893/aksi-bersih-bersih-di-pantai-karyawan-pt-socfindo-kumpulkan-tiga-ton-sampah> [Diakses 24 September 2025].
- [16] Didit, “PT Socfindo Kebun Seunagan Lepas 10.000 Benih Ikan Nila di Pantai Kolam Bebek Desa Kuala Trang,” *Redaksi*, 20 April 2025/ [Online]. Tersedia : https://www.suaraburuhnasional.com/2025/04/pt-socfindo-kebun-seunagan-lepas-10-000-benih-ikan-nila-di-pantai-kolam-bebek-des-kuala-trang/?utm_source=chatgpt.com [Diakses 24 September 2025].